

SIARAN PERS ASOSIASI BAUKSIT INDONESIA (ABI)

Sinergi Regulasi Antar Kementerian Diperlukan untuk Menegakkan Harga Patokan Mineral

Jakarta, 7 Mei 2025 – Menanggapi pernyataan Wakil Menteri Perindustrian dalam Harian Kontan tanggal 4 Mei 2025 bahwa smelter pemegang Izin Usaha Industri (IUI) tidak wajib membeli mineral mentah menggunakan Harga Patokan Mineral (HPM), perlu ditegaskan pentingnya konsistensi kebijakan antar sektor guna menjamin kepastian hukum serta menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkeadilan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No.11 Tahun 2020, khususnya Pasal 7 ayat (2), disebutkan bahwa: “Menteri ESDM dapat merekomendasikan pemberian sanksi administratif kepada Menteri Perindustrian terhadap pemegang Izin Usaha Industri (IUI) yang tidak memenuhi ketentuan harga patokan mineral.”

Ketentuan ini menegaskan bahwa pelanggaran terhadap HPM oleh pelaku industri pengolahan mineral bukan semata-mata menjadi tanggung jawab Kementerian ESDM, tetapi juga termasuk dalam kewenangan Kementerian Perindustrian – terutama dalam hal pembinaan dan penegakan aturan terhadap pemegang IUI.

Pernyataan Wakil Menteri Perindustrian yang mempertanyakan fleksibilitas penerapan HPM sebaiknya dilihat dalam konteks yang lebih luas, yakni pentingnya menjaga tata kelola industri pertambangan dan hilirisasi mineral agar tetap mengedepankan prinsip keadilan, keberlanjutan, serta pemberdayaan sektor hulu – terutama para penambang lokal.

Penetapan HPM oleh Kementerian ESDM bukan tanpa dasar. HPM disusun berdasarkan prinsip transparansi pasar, keekonomian harga, serta perlindungan terhadap pendapatan negara dan pelaku usaha di sektor hulu. Ketidakpatuhan terhadap HPM oleh smelter atau pelaku industri hilir tidak hanya tergolong sebagai

pelanggaran administratif, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak sistemik terhadap ekosistem industri nasional secara keseluruhan.

Karena itu, sinergi lintas Kementerian perlu diperkuat, khususnya dalam pengawasan dan pelaksanaan HPM di lapangan. Kementerian Perindustrian diharapkan menjalankan peran pembinaannya secara aktif dengan menindak tegas pelaku industri yang tidak mematuhi ketentuan tersebut, sesuai rekomendasi dari Kementerian ESDM.

Kepatuhan terhadap HPM adalah fondasi penting dalam membangun ekosistem hilirisasi mineral yang sehat, kompetitif, dan berkeadilan bagi seluruh pemangku kepentingan – baik di sektor hulu maupun hilir.

Ronald Sulistyanto
Ketua Umum

